



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jalan Raya Sentani – Waena TELP. (0967) 571639(K)-571216(P)

Email : jayapura@ptun.org – Website : WWW.ptun-jayapura.go.id

J A Y A P U R A 99358

Jayapura, 7 Desember 2021

Nomor : W4-TUN4/1391/OT.01.2/XII/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Laporan Bulanan,
Bulan November Tahun 2021

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Makassar

Di –

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Bulanan, Bulan
November Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



MASDIN, S.H., M.H
NIP. 19700424 199303 1 004

**LAPORAN BULANAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2021**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl: Raya Sentani - Waena

Telp. 0967-574160 | Fax. 0967-571216

Website: ptun-jayapura.go.id

Email: ptun.jayapura@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	I
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	3
Bab I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Sejarah Singkat	5
C. Maksud Dan Tujuan	7
BAB II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	8
A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara	8
B. Tugas Pokok	8
C. Fungsi	8
D. Manajemen Kesekretariatan	9
1. Struktur Organisasi	10
2. Sumber Daya Manusia	11
3. Jabatan Fungsional yang Diperbantukan pada Jabatan Administrasi	13
4. Promosi, Mutasi dan Pensiun	14
5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)	14
6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP	15
7. Umum Dan Keuangan	16
7.1. Tata kearsipan Dan Perpustakaan	16
7.1.1. Pengelolaan Persuratan	16
7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan	16
7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan	17
7.2. Pengelolaan Aset dan BMN	17
7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan	17
7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN	22
7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN	22
7.3. Realisasi dan Penerimaan Anggaran	23
7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran	23
7.3.2. Laporan PNBPN	23

7.3.3. Data Persekot/ Uang Muka Gaji	24
7.3.4. Ralat SPM	24
8. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan (PTIP)	24
8.1. Revisi DIPA/POK	24
8.2. Pengelolaan Website dan Jaringan	24
E. Manajemen Kepaniteraan	25
1. Laporan Keadan Perkara Dan Jenis Perkara	25
1.1. Laporan Keadaan Perkara	25
1.2. Laporan Jenis Perkara	25
1.3. Laporan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK	26
2. Laporan Pelaksanaan SIPP	26
3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi Dan Pengaduan	26
4. Pelayanan Dan Kegiatan Posbakum	27
5. Tata Kelola Arsip perkara	27
BAB. III Kesimpulan Dan Rekomendasi	29
A. Kesimpulan	29
B. Rekomendasi	29
LAMPIRAN	30
Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01	31
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05	34
Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.01	37
Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05	42
Lampiran 5 : Laporan Perkara (LI-T1,LI-T2,LI-T3,LI-T4, LI- T5, LI-T6)	47

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua	5
Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat	6
Tabel 3. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	7
Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	11
Tabel 5. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	12
Tabel 6. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi	13
Tabel 7. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	13
Tabel 8. Data Promosi dan Mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	14
Tabel 9. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan November 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	14
Tabel 10. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	15
Tabel 11. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode November 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	16
Tabel 12. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	17
Tabel 13. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	17
Tabel 14. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	18
Tabel 15. Daftar Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	19
Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	23
Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	23
Tabel 18. Realisasi Penerimaan PNPB Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	23
Tabel 19. Laporan Keadaan Perkara Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	25
Tabel 20. Laporan Jenis Perkara Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	25
Tabel 21. Laporan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Usaha Negara Jayapura.	26
Tabel 22. Buku Register Meja Informasi Bulan November 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27
Tabel 23. Buku Register Meja Pengaduan Bulan November 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.	27
Tabel 24. Buku Register Register Pelayanan Posbakum bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Bulanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan kegiatan pelaksanaan tugas selama satu bulan yaitu bulan November secara umum, kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pengadilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara / Kepemimpinan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan ke publik.

Dalam melaksanakan tupoksi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

B. Sejarah Singkat

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkedudukan di Jln. Raya Sentani – Waena Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mempunyai tugas pokok memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat .

Sedangkan Wilayah Hukum operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Adalah Wilayah Hukum Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/2538/HK.00.08/XII/2019 Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu:

I. Provinsi Papua

Tabel 1. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	Kota / Kabupaten	Pusat pemerintahan
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Yahokimo	Sumohai
6.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
7.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil
8.	Kabupaten Merauke	Merauke
9.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
10.	Kabupaten Boven Digul	Tanah Merah
11.	Kabupaten Mappi	Kepi
12.	Kabupaten Paniai	Enarotali
13.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia
14.	Kabupaten Waropen	Botawa
15.	Kabupaten Biak Numfor	Biak
16.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
17.	Kabupaten Asmat	Agats

18.	Kabupaten Nabire	Nabire
19.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
20.	Kabupaten Deyai	Tigi
21.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
22.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
23.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui
24.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
25.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
26.	Kabupaten Mimika	Timika
27.	Kabupaten Nduga	Kenyam
28.	Kabupaten Puncak	Ilaga
29.	Kabupaten Yalimo	Elekim

II. Provinsi Papua barat

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	Kota / Kabupaten	Pusat pemerintahan
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Fak-fak	Fakfak
4.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
5.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
6.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
7.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
8.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
9.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai
10.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
11.	Kabupaten Tambrauw	Fef
12.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
13.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

Sejak beroperasi pada tahun 1993 sampai dengan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengalami pergantian pucuk pimpinan sebanyak 13 kali yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Pergantian Pucuk Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	NAMA	MASA JABATAN
1	LAY MINGGUS, SH	Periode 1994 – 1997
2	SAMUEL TULAK, SH	Periode 1997 – 1999
3	DRS YANSON P. SITORUS, SH., MH	Periode 1999 – 2002
4	ANDI LUKMAN, SH	Periode 2002 – 2004
5	SANTER SITORUS, SH., M.HUM	Periode 2004 – 2006
6	ULUAN M. HUTAGALUNG, SH	Periode 2006 – 2007
7	AGUS WAHYU RAHARDI, SH., MH	Periode 2007 – 2009
8	ASMIN SIMANJORANG, SH	Periode 2009 – 2011
9	JAMRES SARAAN, SH	Periode 2011 – 2013
10	KASIM, SH.,MH	Periode 2013 – 2015
11	SINGGIH WAHYUDI, SH	Periode 2015 – 2017
12	IMANUEL MOUW, SH	Periode 2018 – 2020
13	MASDIN, S.H., M.H	Periode 2020 – sekarang

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya laporan bulanan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja dan indikator capaian tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pengadilan Tingkat Banding yang membawahi wilayah hukumnya selama satu bulan periode pelaporan.

Tujuan dibuatnya laporan bulanan ini untuk memberikan dan menyediakan data dukung yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai data sumber penyusunan laporan bulanan, semester dan tahunan serta sebagai bahan informasi dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Peradilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berada di wilayah hukumnya. Dan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura laporan bulanan ini bermanfaat sebagai laporan hasil capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.

B. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

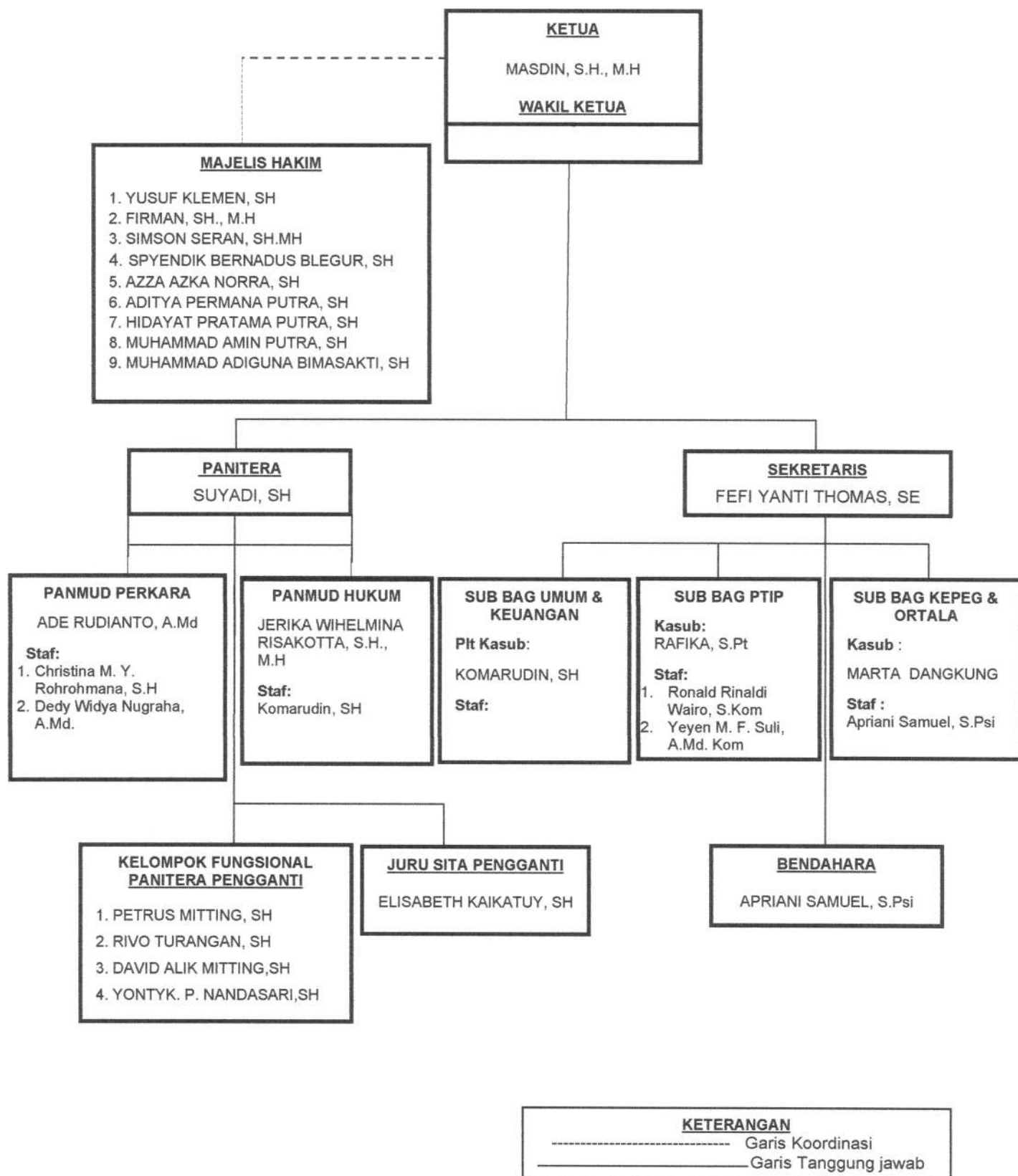
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (kepegawaian, Perencanaan IT dan pelaporan, umum dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Tata Usaha Negara pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

D. Manajemen Kesekretariatan

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada peradilan dibawahnya. Susunan struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)



2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berjumlah 28 Orang yang terdiri dari:

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Ketua	Masdin, S.H., M.H	
2.	Wakil Ketua	-	
3.	Hakim	Yusuf Klemen, SH	
4.	Hakim	Firman, SH., M.H.	
5.	Hakim	Simson Seran, SH., M.H.	
6.	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur, S.H	
7.	Hakim	Azza Azka Norra, S.H., M.H.	
8.	Hakim	Aditya Permana Putra, S.H	
9.	Hakim	Hidayat Pratama Putra, S.H	
10.	Hakim	Muhammad Amin Putra, S.H., M.H	
11.	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H	
12.	Panitera	Suyadi, S.H	
13.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	
14.	Panitera Muda Perkara	Ade Rudianto, A.Md	
15.	Panitera Muda Hukum	Jerika W. Risakotta, S.H., M.H	
16.	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, S.H	
17.	Panitera Pengganti	Rivo Turangan, S.H	
18.	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, S.H	
19.	Panitera pengganti	Yontyk. P. Nandasari, S.H., M.H	
20.	Jurusita Pengganti (Lokal)	Elisabeth Kaikatuy, S.H	
21.	Kasub Bag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rafika, S.Pt	
22.	Plt. Kasub Bag. Umum dan Keuangan	Komarudin, S.H	
23.	Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Marta Dangkung	
24.	Bendahara Pengeluaran	Apriani Samuel, S.Psi	
25.	Staf Panitera Muda Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jayapura
26.	Staf bagian Kepegawaian	Apriani Samuel, S.Psi	

27.	Staf Umum Dan Keuangan	-	
28.	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.	Yeyen. M. F. Suli, A.Md.Kom	
29.	Staf Panitera Muda Perkara	Christina M. Y. Rohrohmana, S.H	
30.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	
31.	Calon Pegawai Negeri Sipil	Dedy Widya Nugraha, A.Md	

Sedangkan berdasarkan pada Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pangkat/Golongan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	Jabatan	Nama	Gol
1	Ketua	Masdin, S.H., M.H	IV/c
2	Wakil Ketua	-	-
3	Hakim	Yusuf Klemen, SH	IV/a
4	Panitera	Suyadi, SH	IV/a
5	Panmud Perkara	Ade Rudianto, A.Md	III/d
6	Staf Hukum	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	III/d
7	Pamud Hukum	Jerika Wihelmina Risakotta, S.H., M.H	III/d
8	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, SE	III/d
9	Hakim	Firman, SH., MH	III/d
10	Panitera Pengganti	Petrus Mitting, SH	III/d
11	Kasub Kepegawaian	Marta Dangkung	III/d
12	Hakim	Simson Seran, SH.,MH	III/c
13	Panitera Pengganti	Rivo Turangan, S.H	III/c
14	Kasub Bag. Perencanaan IT Dan Pelaporan	Rafika. S.Pt	III/c
15	Plt. Kasub Umum dan Keuangan	Komarudin, SH	III/b
16	Panitera Pengganti	Yontyk Putri Nandasari, S.H., M.H.	III/b
17	Panitera Pengganti	David Alik Mitting, SH	III/b
18	Jurusita Pengganti	Elizabeth Kaikatuy, SH	III/b
19	Hakim	Hidayat Pratama Putra, SH, MH.	III/b
20	Hakim	Muhammad Amin Putra, SH., MH	III/b
21	Hakim	Azza Azka Norra, SH., MH	III/b
22	Hakim	Aditya Permana Putra, SH	III/a
23	Hakim	Spyendik Bernadus Blegur,SH	III/a

24	Hakim	Muhammad Adiguna Bimasakti, SH	III/a
25	Bendahara	Apriani Samuel, S.Psi	III/a
26	Staf Panitera muda Perkara	Christina. M. Y. Rohrohmana, SH	III/a
27	Calon Pegawai Negeri Sipil	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	III/a
28	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	II/c
29	Calon Pegawai Negeri Sipil	Dedy Widya Nugraha, A.Md	II/c

3. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi

Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi pada Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura.

Tabel 6. Jabatan fungsional yang diperbantukan pada jabatan administrasi lainnya

No	Nama	Jabatan Fungsional	Jabatan Administrasi lainnya
1	Yontyk P. Nandasari, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.
2	Yeyen M. F. Suli., A.Md.Kom	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.
3	Rivo Turangan, S.H	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Panitera Muda Perkara.
4	Apriani Samuel, S.Psi	Kepegawaian dan ORTALA	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan.
5	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan
6	Dedy Widya Nugraha, A.Md.	Panitera Muda Perkara	Diperbantukan di Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 7. Tenaga Honorer yang Diperbantukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO	NAMA		PENEMPATAN	TUGAS SESUAI SK
1.	Billy Langoy	:	diperbantukan di bagian Umum dan Keuangan	Pengemudi
2.	Esti Sitinjak, S.Kom	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi	Pramubakti
3.	Rahmat, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panmud perkara	Pramubakti
4.	Maikel P. kelyanin, S.T.	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Pramubakti
5.	Syane Ratag, S.E.	:	diperbantukan di bagian Umum dan keuangan	Pramubakti
6.	Ridwan Kristiawan, S.H.	:	diperbantukan di bagian Panmud Hukum	Pengemudi
7.	Heni M. Klemen, S.H.	:	diperbantukan di bagian Kepegawaian Organisasi	Pramubakti
8.	Jhon Lewakabessy, S.T.	:	diperbantukan di bagian Panmud Hukum	Satpam

9.	Izak Pattipeilohy	:	diperbantukan di bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan	Pramubakti
----	-------------------	---	--	------------

4. Promosi, Mutasi dan Pensiun

Terdapat pejabat dan atau pegawai yang pada bulan November mendapat promosi/ mutasi dan tidak terdapat pegawai yang pensiun.

Tabel 8. Data Promosi dan Mutasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Nama	Promosi/Mutasi		TMT
		Jabatan Lama	Jabatan Baru	
-	-	-	-	-

5. Diklat/Bimtek (SDM Teknik / Non Teknis)

Tabel 9. Diklat/Bimtek SDM Teknis dan Non Teknis Hakim dan Pegawai Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat/Bimtek	Pelaksana
1	APRIANI SAMUEL, S.Psi	BENDAHARA	Bimbingan Teknis SIMAK BMN, BMN dan SAIBA.	PTTUN MAKASSAR
2	DEDY WIDYA NUGRAHA, A.Md.	BENDAHARA	Bimbingan Teknis SIMAK BMN, BMN dan SAIBA.	PTTUN MAKASSAR
3	AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
4	MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
5	ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
6	HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
7	MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
8	SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.	HAKIM	Kajian Pembaharuan Hukum Acara pada Peradilan Tata Usaha Negara.	Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI

6. Pengelolaan Database SAPK dan SIKEP

Database SAPK dikelola oleh MARTA DANGKUNG sebagai administrator pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Pemutakhiran database SAPK dilakukan setiap ada perubahan data pegawai terkait dengan kenaikan pangkat, promosi/mutasi/pensiun, serta perubahan data identitas pegawai. Pada aplikasi Sikep Mahkamah Agung, pengelolaan database dilakukan oleh MARTA DANGKUNG sebagai user administrator satuan kerja. Hasil rekapitulasi kelengkapan database pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada aplikasi SIKEP adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Kelengkapan Database Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Nama Pegawai	Status	Keterangan
1	Masdin, S.H., M.H	Lengkap	-
2	Yusuf Klemen, SH	Lengkap	-
3	Firman, S.H., M.H.	Lengkap	-
4	Simson Seran, S.H., M.H.	Lengkap	-
5	Spyendik Bernadus Blegur, SH	Lengkap	-
6	Azza Azka Norra, SH., MH	Lengkap	-
7	Aditya Permana Putra, SH	Lengkap	-
8	Hidayat Pratama Putra, SH	Lengkap	-
9	Muhammad Amin Putra, SH., MH	Lengkap	-
10	Muhammad Adiguna Bimasakti, SH	Lengkap	-
11	Suyadi, SH	Lengkap	-
12	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.	Lengkap	-
13	Ade Rudianto, A.Md	Lengkap	-
14	Jerika Wilhelmina. Risakotta, S.H., M.H	Lengkap	-
15	Fefi Yanti Thomas, SE	Lengkap	-
16	Petrus Mitting, SH	Lengkap	-
17	Marta Dangkung	Lengkap	-
18	Rivo Turangan, SH	Lengkap	-
19	Yontyk P.Nandasari, SH, MH	Lengkap	-
20	Elizabeth Kaikatuy, SH	Lengkap	-
21	Rafika, S.Pt	Lengkap	-
22	David Alik Mitting, SH	Lengkap	-
23	Komarudin, SH	Lengkap	-
24	Christina M. Y. Rohrohmana, SH	Lengkap	-

25	Apriani Samuel, S.Psi	Lengkap	-
26	Yeyen M. F. Suli, A.Md.Kom	Lengkap	-
27	Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom	Lengkap	-
28	Dedy Widya Nugraha, A.Md	Lengkap	-

7. Umum dan Keuangan

7.1. Tata Kearsipan dan Perpustakaan

7.1.1. Pengelolaan Persuratan

Mengacu pada ketentuan dalam Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Surat Masuk dan Surat Keluar kedinasan melalui satu pintu pengelolaan di bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 11. Data Surat Masuk dan Surat Keluar Periode November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	Bagian	Jumlah	
		Surat masuk	Surat keluar
1	Umum & Keuangan	19	32
2	Kepegawaian & Ortala	28	25
3	Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	2
4	Kepaniteraan Perkara	19	64
5	Kepaniteraan Hukum	-	1

7.1.2. Pengelolaan Perpustakaan

Tanggung jawab pengelolaan perpustakaan dibawah kendali Kasubbag Umum dan Keuangan dan sebagai petugas Kepustakaan (pustakawan) belum ditunjuk Penunjukan petugas perpustakaan belum dituangkan kedalam Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jumlah koleksi buku yang tersimpan di perpustakaan sampai dengan bulan November 2020 berjumlah 1200 (seribu dua ratus) buku. Pengelolaan database perpustakaan belum dilakukan ke dalam buku register pustaka. Pengelolaan database secara elektronik belum dilakukan melalui aplikasi

SLIM Senayan, Sebagian buku telah dilakukan pengkodean atau labelisasi dan pemberian index pada buku koleksi.

- 7.1.3. Sarana dan Prasarana Kearsipan dan Kepustakaan
Lemari Perpustakaan dua buah, dan meja satu buah.

7.2. Pengelolaan Aset dan BMN

7.2.1. Data Tanah, Gedung dan Kendaraan

Gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdiri diatas tanah seluas 3500 m2 dengan rincian luasan gedung 1444 m2, halaman gedung 2780 m2 dan pagar 237,6 m2. Rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

Tabel 12. Data Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Type	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan
1	B	1992	700 m2	200 m2
2	B	1992	700 m2	150 m2
3	B	1992	1100 m2	120 m2
4	B	1992	1100 m2	120 m2
5	B	1992	1100 m2	120 m2
6	B	1992	1100 m2	120 m2

Peruntukan rumah dinas berdasarkan Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Data Peruntukan Rumah Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Type	Luas Tanah	No.SK	Pengguna	Jabatan	Ket
1	B	700 M2	W4-TUN4/75/PL.01/II/2021	Masdin, S.H., M.H.	Ketua	
2	B	700 M2	-	-	Wakil ketua	
3	B	1100 M2	W4-TUN4/803/PL.01/VII/2020	Azza Azka Norah, SH	Hakim	
4	B	1100 M2	W4-TUN4/2000/PL.02.01/VII/2019	Firman, SH., MH	Hakim	

5	B	1100 M2	W4-TUN4/942/ PL.02.01/VIII/2020	Simson Seran,SH., MH	Hakim	
6	B	1100 M2	W4-TUN4/466/ PL.01/III/2021	Aditya Permana Putra, SH	Hakim	

Data kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas.

Tabel 14. Data Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Nama Aset	Tahun	No.Plat	Kondisi	N0.SK	Pengguna	Jabatan	KETERANGAN
1	Toyota Innova	2012	PA 1629 DT	Baik	W4-TUN4 /77/PL.06/II/2021	MASDIN, S.H., M.H.	KETUA	
2	Toyota Vios	2006	DS 4132 DZ	Baik	-	-	-	BELUM ADA SK
3	Toyota Innova	2011	PA 1988 DZ	Baik	W4-TUN4 /231/PL.06/II/2019	FEFI YANTI THOMAS, SE	SEKRETARIS	
4	Toyota Kijang KF 71 SPR	2003	DS 5595 AC	Baik	W4-TUN4 /219/PL.06/II/2019	SUYADI,SH	PANITERA	
5	Toyota Kijang Super	1993	PA 16978 DZ	Baik	W4-TUN4 /2325/PL.06/X/2019	DAVID.ALIK MITTING,SH	PANITERA PENGGANTI	
6	Honda	2011	PA 4289 DZ	Baik	W4-TUN4/ 245/PL.06/II/2021	MASDIN, S.H., M.H.	KETUA	
7	Honda	2009	DS 6219 AF	Baik	-	-	-	BELUM ADA SK
8	Honda	2011	PA 4396 DZ	Baik	W4-TUN4 226./ PL.06/ II /2020	RIVO TURANGAN,SH	PANITERA PENGGANTI	
9	Honda	2008	DS 6473 AE	Baik	W4-TUN4 /2090a/PL.07/IX/2019	MARTA DANGKUNG	KASUB.KEPG & ORTALA	
10	Honda	2008	DS 6898 AE	Baik	W4-TUN4 /2312/PL.06/X/2019	FEFI YANTI THOMAS,SE	SEKRETARIS	
11	Honda	2005	DS 4133 DZ	Baik	W4-TUN4 /227/PL.06/II/2019	PETRUS MITTING,SH	PANITERA PENGGANTI	
12	Honda	2009	DS 6305 AF	Baik	W4-TUN4 /242/PL.06/II/2019	KOMARUDIN,SH	PLT. KASUB UMUM DAN KEUANGAN	
13	Honda	2009	DS 6218 AF	Baik	W4-TUN4 /241/PL.06/II/ 2019	ELIZABETH.K,SH	JURU SITA PENGGANTI	
14	Honda	2005	DS 4132 DZ	Baik	W4-TUN4 /227/ PL.06/II/ 2020	CHRISTINA.M.Y. ROHROHMANA, S.H	STAF PANMUD PERKARA	
15	Honda	2007	DS 6899 AE	Bik	W4-TUN4 / 229/PL.06/II/2019	ADE RUDIANTO. A.Md	PANMUD PERKARA	

16	Honda	2011	PA 4290 DZ	Baik	W4-TUN4 /1042/PL.06/VII/2019	YONTYK.P.N,S. H	PANITERA PENGANTI	PEJABAT PENGADAAN
17	Honda	2007	PA 4519 DZ	Baik	W4-TUN4 /2487/ PL.06/XII/2019	JERIKA W. RISAKOTTA, S.H.	PANMUD HUKUM	
18	Honda	2007	DS 3473 AE	Baik	W4-TUN4/247/ PL.06/II/2020	RAFIKA. S.Pt	KASUB PTIP	

Data Ruangan dan Barang Milik Negara pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Jayapura terdiri atas:

**Tabel 15. Daftar Ruangan dan Barang Milik Negara pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura**

NO	NAMA RUANGAN DAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Sidang Utama	1	Baik
2	Ruang Sidang Kecil	1	Baik
3	Loby Depan	1	Baik
4	Loby Belakang	1	Baik
5	Ruang CCTV	1	Baik
6	Ruang Musholla	1	Baik
7	Ruang Posbakum	1	Baik
8	Ruang Bermain Anak dan Laktasi	1	Baik
9	Ruang Perpustakaan dan Fotocopy	1	Baik
10	Ruang Kepaniteraan Perkara	1	Baik
11	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
12	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Baik
13	Ruang Ketua	1	Baik
14	Ruang Wakil	1	Baik
15	Ruang Tambahan	1	Baik
16	Ruang Hakim 1	1	Baik
17	Ruang Hakim 2	1	Baik
18	Ruang Panitera	1	Baik
19	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
20	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	1	Baik
21	Ruang Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	1	Baik
22	Ruang Server	1	Baik
23	Ruang Arsip	1	Baik
24	Pantry	1	Baik

25	Gudang	1	Baik
26	Cermin Besar	5	Baik
27	Rak Arsip	18	2 Rusak
28	Lemari Pakaian 3 Pintu	1	Baik
29	Lemari Pakaian 2 Pintu	1	Baik
30	Lemari Penyimpan Piring	1	Baik
31	Mesin Ketik 14-16inch	3	2 Rusak
32	Mesin Ketik 18-27inch	2	Rusak
33	Lemari Besi	11	3 Rusak
34	Lemari Kayu	44	8 Rusak
35	Rak Kayu	1	Baik
36	Filling Cabinet Besi	13	4 Rusak
37	Brankas	2	Baik
38	Papan Visual/Papan Nama	17	4 Rusak
39	White Board	2	Baik
40	LCD Projector	1	Baik
41	Papan Pengumuman	1	Baik
42	Stand Speaker	2	Baik
43	Stand Mic	2	Baik
44	Meja Kerja Kayu	120	29 Rusak
45	Kursi Besi/Metal	77	Baik
46	Kursi Kayu	91	3 Rusak
47	Sice	20	8 rusak
48	Bangku Panjang Kayu	34	Baik
49	Meja Komputer	2	Baik
50	Rangka	2	Baik
51	Tempat Tidur Lipat Besi	1	Rusak
52	Tempat Tidur Kayu	3	Rusak
53	Meja Telepon	1	Baik
54	Meja Resepsionis	2	Baik
55	Kasur/Springbed	7	Baik
56	Sketsel(pembatas Sidang)	2	Baik
57	Meja Makan Kayu	1	Baik
58	Kursi Fiber Glas/Plastik	70	1 Rusak
59	Pot Bunga	6	Baik
60	Jam Dinding	10	7 Rusak

61	Lemari Es	2	Rusak
62	AC Split	36	Baik
63	Kipas Angin	18	2 Rusak
64	Mixer	3	Baik
65	Televisi	7	Baik
66	Amplifier	3	Baik
67	Equalizer	1	Baik
68	Loudspeaker	10	2 Rusak
69	Sound System	1	Baik
70	Microphone	2	Baik
71	Microphone table stand	6	2 Rusak
72	UPS	2	Baik
73	Stabilizer	3	Baik
74	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
75	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik
76	Tiang Bendera	5	Baik
77	Pataka	5	Baik
78	Kaca Hias	2	Baik
79	Dispenser	5	2 Rusak
80	Mimbar/Podium	2	Baik
81	Palu Sidang	3	1 Rusak
82	Handycam	1	Baik
83	Lambang Instansi	1	Baik
84	Gordyn	9	Baik
85	Kabel roll	9	1 Rusak
86	Asbak Tinggi	3	2 Rusak
87	Keset Kaki	6	Baik
88	Kabel	2	Rusak
89	Wireless Mic	6	Baik
90	Uninterruptible Power Supply	6	Baik
91	Camera Digital	1	Baik
92	Key Telephone	5	1 Rusak
93	Pesawat Telepon	12	9 Rusak
94	Telephone Mobile	2	1 Rusak
95	Faximile	3	Baik
96	Antene SHF Transportable	2	Rusak

97	Antena Parabola	2	Rusak
98	Receiver matriks	1	Baik
99	Genset	1	Baik
100	Alat Pemadam Kebakaran	1	Rusak
101	Generator	2	Rusak
102	UPS	4	Rusak
103	Microtic Internet	1	Baik
104	Komputer Jaringan	3	Baik
105	PC Unit	30	10 Rusak
106	Notebook	20	Baik
107	HardDisk	3	Baik
108	Printer	26	4 Rusak
109	Scanner	3	Baik
110	Server	2	Baik
111	Router	2	Baik
112	Rak Server	1	Baik
113	Rambu Papan Tambahan	1	Baik
114	Alat Tenis Meja	2	1 Rusak
115	Software Komputer	1	Baik

7.2.2. Penetapan Status dan Penggunaan BMN

Mengacu pada PMK Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang penetapan status BMN dan Perma Nomor: 1 Tahun 2017 tentang penetapan status BMN serta berdasar usulan penetapan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: W4-TUN4/928/um.03.10/1x/2017 tanggal 04 DESEMBER 2017 SK penetapan status BMN atas Tanah dan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum ada.

7.2.3. Pengalihan Status dan Penghapusan BMN

Pengalihan status BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Usulan penghapusan BMN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah diselesaikan tuntutan ganti rugi (TGR).

7.3. Realisasi Anggaran dan Penerimaan Negara

7.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.01 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Belanja	DIPA (005.01)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pegawai	4.536.111.000	332.870.293	4.190.455.893	345.655.107
2	Barang	1.585.532.000	205.279.821	1.346.391.908	239.140.092
3	Modal	265.000.000	27.500.000	226.500.000	38.500.000

Laporan Realisasi Anggaran DIPA 005.05 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan pos belanja:

Tabel 17. Realisasi Anggaran DIPA 005.05 Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No	Belanja	DIPA (005.05)	Realisasi		Sisa
			Bulan ini	S/d Bln ini	
1	Pegawai	-	-	-	-
2	Barang	54.400.000	3.504.500	26.752.500	27.647.500
3	Modal	-	-	-	-

Rincian laporan realisasi anggaran manual dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.2. Laporan PNPB

Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode bulan November Tahun 2021 secara umum sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi Penerimaan PNPB Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Akun	Jenis Pendapatan	Bln ini	Sd Bln ini
1	425131	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.559.460	14.775.474
2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-
3	425232	Uang Meja (Leges)	180.000	1.330.000
4	425233	Ongkos Perkara	240.000	3.670.000
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.907.500	14.272.500
		Total	3.886.960	34.047.974

Laporan realisasi PNBPN secara rinci dapat dilihat pada tabel lampiran.

7.3.3. Data persekot/ Uang Muka Gaji

Pada Periode bulan November Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak mempunyai Persekot.

7.3.4. Ralat SPM

Pada bulan November Pengadilan tata Usaha Negara Jayapura tidak terdapat Ralat SPM.

8. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

8.1. Revisi DIPA/POK

Pada bulan November Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan revisi DIPA 01. DIPA 01 revisi ke 3 dan ke 4 berupa revisi POK dan revisi pagu minus pegawai.

8.2. Pengelolaan Website dan Jaringan

Pembuatan website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah mengacu pada ketentuan dalam surat Ketua Mahkamah Agung SK MA 1-144 tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari SK 144/2007 mengenai dasar pembuatan situs Mahkamah Agung. Alamat website Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat diakses di ptun-jayapura.go.id.

Pengelolaan website sudah sepenuhnya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura termasuk akun Hosting sudah atas nama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tanggung jawab pengelolaan ada pada Kasubag PTIP sesuai SK Nomor W4-TUN4/55/OT.01.3/1/2021 Pelaksana redaktur dan editor adalah Ronald Rinaldi Wairo, S.Kom. Jaringan internet menggunakan vendor pihak ketiga yaitu Telkom Indonesia dengan kecepatan 310 Mbps dengan pengaturan 1 acces point 20 Mbps termasuk untuk kepentingan pelaksanaan SIPP sebesar 10 Mbps.

E. Manajemen Kepaniteraan

1. Laporan Keadaan Perkara dan Jenis Perkara

1.1. Laporan Keadaan Perkara

Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 19. Laporan Keadaan Perkara Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Perkara	Sisa Bln lalu	Masuk bln ini	Putus bln ini	Sisa sd bln ini	Keterangan			
						Cabut	Gugur	PLW	Dismisal
1	Gugatan	13	2	1	14	-	-	-	-
2	Banding	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasasi	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Eksekusi	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Laporan Jenis Perkara

Laporan Jenis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura periode bulan November Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 20. Laporan Jenis Perkara Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Jenis Perkara	sisa bln lalu	bulan ini	s/d bln in
1	Pertanahan	3	1	4
2	Kepegawaian	1	-	1
3	Perijinan	4	-	4
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	2	-	2
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-
11	Ketenaga Kerjaan	-	-	-
12	KIP	-	-	-
13	Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Umum	-	-	-
14	Permohonan Fiktif Positif	-	-	-
15	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-
17	Merek	-	-	-
18	Lain-lain	3	1	4
Total		13	2	15

1.3. Laporan jumlah perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.

Tabel 21. Laporan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No	Perkara yang tidak mengajukan:	s/d Bln Lalu	Bulan Ini	s/d Bln ini
1	Banding	-	-	-
2	Kasasi	-	-	-
3	Peninjauan Kembali	-	-	-
4	Eksekusi	-	-	-
Total		-	-	-

2. Laporan Pelaksanaan SIPP

Secara umum penanggung jawab pelaksanaan SIPP adalah seluruh stake holder yang berkepentingan dalam alur/bisnis proses perkara. Aplikasi SIPP yang telah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah SIPP Versi 4.0.1. Rasio penanganan perkara sampai dengan akhir bulan November Tahun 2021 belum bisa dilihat dikarenakan aplikasi SIPP MA sedang dalam perawatan atau maintenance. Kendala teknis pengisian aplikasi diantaranya adalah gangguan pada jaringan internet sedangkan non teknis terkait dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik.

3. Pengelolaan dan Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Pengelolaan dan pelayanan meja informasi mengacu pada SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang telah diperbarui dengan SK KMA No. 1-144KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memiliki sarana meja informasi dan meja pengaduan. Petugas meja informasi telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/110/HM.02.3/II/2021 tentang Pengelola Meja Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan petugas meja pengaduan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W4-TUN4/109/HM.02.3/II/2021 tentang Pelayanan Pengaduan. Sarana lainnya telah tersedianya buku register meja informasi dan pengaduan.

Tabel 22. Buku Register Meja Informasi Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

No.	Pemohon	Tgl diterima	Obyek pemohon	Tindak Lanjut
1	SHARON WILLBERTHSRAEL FAKDAWER, S.H.	12/11/2021	Salinan Putusan No. 17/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
2	KARENNU	12/11/2021	Salinan Putusan Banding No.15/B/2020/PTTUN.MKS. Kasasi No. 516 K/TUN/2020	Mendapat Salinan Putusan
3	I GEDE BAYU PURBA WISESA	15/11/2021	Salinan Putusan No. 6/G/2021/PTUN.JPR No. 7/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
4	LUKAS ULI AWAM MUDA ASE	24/11/2021	Salinan Putusan No. 5/G/2020/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
5	ARI KURNIAWAN, S.T.	26/11/2021	Salinan Putusan No. 21/G/2021/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan
6	YULI IRIANI	29/11/2021	Salinan Putusan Banding No. 149/B/2021/PTTUN.MKS JO 44/G/2019/PTUN.JPR	Mendapat Salinan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menyiapkan sarana meja pengaduan dan petugas meja pengaduan telah ditunjuk melalui SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 23. Buku Register Meja Pengaduan Bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Sumber Pengaduan	Tgl diterima	Subyek	No. Register
1	-	-	-	-

4. Pelayanan dan Kegiatan Posbakum

Tabel 24. Buku Register Pelayanan Posbakum bulan November Tahun 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

No.	Pemohon	Jenis Jasa	Jumlah Jam Layanan	Ket
1	-	-	-	-

5. Tata Kelola Arsip Perkara

Pengelolaan arsip perkara dibedakan kedalam arsip perkara yang masih aktif (perkara yang belum putus atau masih dalam proses upaya hukum) berada

pada kepaniteraan perkara, sedangkan arsip perkara yang sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, dilimpahkan ke Kepaniteraan Hukum kepada Panitera Muda Hukum. Arsip perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dipindahkan dari ruang Kepaniteraan Hukum ke tempat ruang penyimpanan arsip perkara dengan luas penyimpanan yang tergolong kecil dan kurang memadai untuk menyimpan arsip perkara dalam jumlah banyak.

Ruang arsip perkara telah menempati ruang khusus pengarsipan yang terletak di ruangan arsip perkara. Telah dilakukan pelabelan nomor perkara pada berkas perkara.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dengan luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka dituntut adanya pelayanan yang prima dan lebih baik terhadap masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sangat diperlukan terpenuhinya sarana dan prasarana berupa pagar kantor yang belum diselesaikan serta Pelatihan sumber daya manusia ditingkatkan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lebih baik kedepan.

B. Rekomendasi

Tertibnya Pelaksanaan Administrasi serta jalannya sistem peradilan yang baik hal ini tidak terlepas dari terpenuhinya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya yaitu adanya tertib disiplin kerja sesuai instruksi Ketua Mahkamah Agung R.I.

Maka sehubungan hal tersebut diatas maka diusulkan sebagai berikut:

1. Diharapkan segera adanya pengisian Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang saat ini sedang kosong.
2. Diharapkan realisasi penambahan pegawai sebanyak 5 (lima) orang, mengingat tenaga staf pada masing-masing Sub Bagian sangat kurang.
3. Diharapkan Pelatihan Aplikasi Perkantoran untuk Operator atau Admin.
4. Penambahan Anggaran DIPA tahun berikutnya pada layanan sarana internal (Belanja Modal), khususnya renovasi/pembangunan pagar yang dipandang perlu untuk segera direalisasikan mengingat tinggi pagar yang ada sekarang belum memadai untuk keamanan kantor dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Jayapura, 7 Desember 2021


MASDIN, S.H., M.H
NIP.19700424 199303 1004

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.01

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Manual DIPA 005.05

Lampiran 3 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.01

Lampiran 4 : Laporan Realisasi PNBP DIPA 005.05

Lampiran 6 : Laporan Perkara (LI – T1, LI – T2, LI – T3, LI – T4, LI – T5, LI – T6)

LAMPIRAN 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN NOVEMBER 2021

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539138)

PROINSI : PAPIA (2500)

BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

NO DIPAJ TGL DIPAJ : SP DIPAJ- 005.01.2.539138/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020

NO DIPAJ TGL DIPAJ REVISI : DIPAJ- 005.01.2.539138/2021 REVISI KE-1 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021, DIPAJ- 005.01.2.539138/2021 REVISI KE-2 TANGGAL 14 OKTOBER 2021, DIPAJ- 005.01.2.539138/2021 REVISI KE-3 TANGGAL

: 01 NOVEMBER 2021, DIPAJ- 005.01.2.539138/2021 REVISI KE-4 TANGGAL 23 NOVEMBER 2021

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI/ BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
				5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
1	005.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi										
	1066.EAA.001	LAYANAN PERKANTORAN										
	001	Gaji dan Tunjangan										
	A. 511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,283,557,000	1,098,065,260	85.55%	92,789,260	7.23%	1,190,854,520	92.78%	92,702,480	7.22%	
	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	15,787	83.14%	1,350	7.11%	17,147	90.25%	1,853	9.75%	
	511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	94,925,000	80,955,200	85.28%	6,924,480	7.29%	87,879,680	92.58%	7,045,320	7.42%	
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,725,000	26,850,002	84.63%	2,347,276	7.40%	29,197,278	92.03%	2,527,722	7.97%	
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	28,080,000	85.71%	2,340,000	7.14%	30,420,000	92.86%	2,340,000	7.14%	
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,974,850,000	1,691,820,000	85.67%	141,515,000	7.17%	1,833,335,000	92.83%	141,515,000	7.17%	
	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	292,266,000	254,619,681	87.12%	19,278,167	6.60%	273,897,848	93.72%	18,368,152	6.28%	
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,150,000	66,843,660	85.53%	5,648,760	7.23%	72,492,420	92.76%	5,657,580	7.24%	
	511129	Belanja Uang Makan PNS	222,494,000	173,431,000	77.95%	17,736,000	7.97%	191,167,000	85.92%	31,327,000	14.08%	
	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	219,595,000	181,805,000	82.79%	19,000,000	8.65%	200,805,000	91.44%	18,790,000	8.56%	
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	17,770,000	15,100,000	84.97%	1,290,000	7.26%	16,390,000	92.23%	1,380,000	7.77%	
	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	288,000,000	240,000,000	83.33%	24,000,000	8.33%	264,000,000	91.67%	24,000,000	8.33%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.001	4,536,111,000	3,857,585,600	85.04%	332,870,293	7.34%	4,190,455,893	92.36%	345,655,107	7.62%	
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor										
	A. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	372,744,000	286,514,000	76.87%	26,376,000	7.08%	312,890,000	83.94%	59,854,000	16.06%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	46,482,000	36,570,880	78.68%	7,282,000	15.67%	43,852,880	94.34%	2,629,120	5.66%	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	65,081,000	36,950,000	56.78%	25,177,500	38.69%	62,127,500	95.46%	2,953,500	4.54%	
	B. 521111	Belanja Keperluan Perkantoran	206,050,000	170,401,969	81.90%	18,336,000	8.81%	188,737,969	90.72%	19,312,031	9.28%	
	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,600,000	14,644,920	78.74%	973,320	5.23%	15,618,140	83.97%	2,981,860	16.03%	
	522111	Belanja Langganan Listrik	151,800,000	124,539,235	82.04%	12,951,623	8.53%	137,490,858	90.57%	14,309,142	9.43%	
	522112	Belanja Langganan Telepon	4,200,000	3,030,147	72.15%	413,564	9.85%	3,443,711	81.99%	756,289	18.01%	
	522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	2,600,500	72.24%	192,000	5.33%	2,792,500	77.57%	807,500	22.43%	
	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	123,120,000	87,210,000	70.83%		0.00%	87,210,000	70.83%	35,910,000	29.17%	
	C. 523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,170,000	112,000,000	99.85%		0.00%	112,000,000	99.85%	170,000	0.15%	
	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	84,192,000	0	0.00%	84,000,000	99.77%	84,000,000	99.77%	192,000	0.23%	

(dalam rupiah)

NO	KODE	JENIS BELANJAMA/K	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	233,110,000	169,142,236	72.56%	21,829,114	9.36%	190,971,350	81.92%	42,138,650	18.08%	
	D. 521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,080,000	32,310,000	75.00%		0.00%	32,310,000	75.00%	10,770,000	25.00%	
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49,847,000	26,800,000	53.36%		0.00%	26,800,000	53.36%	23,047,000	46.64%	
	G. 522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3,600,000	1,184,000	32.89%	1,065,000	30.42%	2,279,000	63.31%	1,321,000	36.69%	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,624,000	17,394,600	40.79%	6,353,700	14.91%	23,738,300	55.69%	18,885,700	44.31%	
	I. 524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	1,050,000	43.75%	300,000	12.50%	1,350,000	56.25%	1,050,000	43.75%	
	K. 521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,832,000	18,979,700	91.11%		0.00%	18,979,700	91.11%	1,852,300	8.89%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAA.002	1,585,532,000	1,141,112,087	71.97%	205,279,821	12.95%	1,346,391,908	84.92%	239,140,092	15.08%	
	106.EAC.003	LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENGADILAN										
	052	Non Operasional Satker Daerah										
	A. 521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (Rapid Test)	5,000,000	3,040,000	60.80%		0.00%	3,040,000	60.80%	1,960,000	39.20%	
		JUMLAH KEGIATAN 1066.EAC.003	5,000,000	3,040,000	60.80%	0	0.00%	3,040,000	60.80%	1,960,000	39.20%	
	1071	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG										
	1071.EAD.001	LAYANAN SARANA INTERNAL										
	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	A. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (PC Kepaniteraan)	37,500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	37,500,000	100.00%	
	B. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Mesin antrian sidang))	27,500,000	0	0.00%	27,500,000	100.00%	27,500,000	100.00%	0	0.00%	
	C. 532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Ruang sidang online)	200,000,000	199,000,000	99.50%	0	0.00%	199,000,000	99.50%	1,000,000	0.50%	
		JUMLAH KEGIATAN 1071.EAD.001	265,000,000	199,000,000	75.09%	27,500,000	10.38%	226,500,000	85.47%	38,500,000	14.53%	
		JUMLAH KESELURUHAN	6,391,643,000	5,200,737,687	81.37%	565,650,114	8.85%	5,766,387,801	90.22%	623,295,199	9.75%	



Jumlah Anggaran	6,391,643,000	Persentase
Realisasi Anggaran	5,766,387,801	90.22%
Sisa Anggaran	625,255,199	9.78%

LAMPIRAN 2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MANUAL DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN OKTOBER 2021

SATKER/ KODE SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA (539139)
 PROPINSI : PAPUA (2500)
 BAGIAN ANGGARAN : MAHKAMAH AGUNG (005)
 UNIT ORGANISASI : DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN (05)
 NO DIPA/ TGL DIPA : SP DIPA- 005 05 2 539139/2021 TANGGAL 23 NOVEMBER 2020
 NO DIPA/ TGL DIPA REVISI : DIPA- 005 05 2 539139/2021 REVISI KE-1 TANGGAL 21 OKTOBER 2021

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	% 6=(5/4)	TOTAL	% 8=(7/4)	TOTAL	% 10=(9/4)	TOTAL	% 12=(11/4)	
1	2	3	4	5		7		9=(5+7)		11=(4+9)		13
	005.05.BF	PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM										
	1059	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA										
	1059.BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan										
I	1059.BBA.001	Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN										
	051	Pelaksanaan Pengamanan Sidang										
	A. 521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Biaya Pengamanan Sidang)	20,000,000	304,000	1.52%	280,000	1.40%	584,000	2.92%	19,416,000	97.08%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	20,000,000	304,000	1.52%	280,000	1.40%	584,000	2.92%	19,416,000	97.08%	
II	1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
	051	Pos Bantuan Hukum										
	A	Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum										
	A. 521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK Posbakum)	4,200,000	1,344,000	32.00%	824,500	19.63%	2,168,500	51.63%	2,031,500	48.37%	
	A. 522131	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	28,800,000	21,600,000	75.00%	2,400,000	8.33%	24,000,000	83.33%	4,800,000	16.67%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.001	33,000,000	22,944,000	69.53%	3,224,500	9.77%	26,168,500	79.30%	6,831,500	20.70%	

NO	KODE	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI		KET
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8=(7/4)	9=(5+7)	10=(9/4)	11=(4-9)	12=(11/4)	13
III	1059.QBA.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara										
	051	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara										
	A. 521219	Biaya Perkara Prodeo	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KEGIATAN 1059.002	1,400,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1,400,000	100.00%	
		JUMLAH KESELURUHAN	54,400,000	23,248,000	42.74%	3,504,500	6.44%	26,752,500	49.18%	27,647,500	50.82%	

Jumlah Anggaran	54,400,000	Percentage
Realisasi Anggaran	26,752,500	49.18%
Sisa Anggaran	27,647,500	50.82%



LAMPIRAN 3
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.01

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01

TAHUN : 2021
 BULAN : November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISETOR (Rp)
I		Pendapatan dari Pemindah tangan BMN				
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin				
	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				
		JUMLAH I			0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- sewa rumah dinas bulan November 2021	1	0	1.559.460	1.559.460
		JUMLAH II			1.559.460	1.559.460
III		Pendapatan Jasa				
		JUMLAH III			0	0
IV		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
		JUMLAH IV			0	0
V		Pendapatan Denda I				
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah				
		JUMLAH V			0	0
VI		Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu				
		JUMLAH VI			0	0
VII		Pendapatan Pelunasan Piutang				
		JUMLAH VII			0	0
VIII		Pendapatan dari Penutupan Rekening				
		JUMLAH VIII			0	0
IX		Pendapatan Lain-lain				
	123456789	coba				
		JUMLAH IX			0	0
X		Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang				
		JUMLAH X			0	0
XI		Pendapatan Jasa Lainnya				
		JUMLAH XI			0	0
XII		Pendapatan Bunga				
	425719	Pendapatan Bunga Lainnya				
		JUMLAH XII			0	0
XIII		Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening				
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)				
		JUMLAH XIII			0	0
XIV		Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				
	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat				
		JUMLAH XIV			0	0
XV		Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I				
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu				
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu				
	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu				
		JUMLAH XV			0	0
XVI		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan				
	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS				
	425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara				
		JUMLAH XVI			0	0
XVII		Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang				

	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya				
		JUMLAH XVII			0	0
XVIII		Pendapatan Lain-lain II				
	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain				
		JUMLAH XVIII			0	0
XIX		Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI - HAK UJI MATERIIL				
		JUMLAH XIX			0	0
		JUMLAH I s/d XVIII			1.559.460	1.559.460

Mengetahui

Sekretaris

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Fefi Yanti Thomas, SE

NIP. 197903102006042002

Jayapura, 30 November 2021

Bendahara Penerimaan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA

ROHROHMANA, S.H.

NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNBP

FORM 01A

TAHUN : 2021
 BULAN : Januari - November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.01.2.539138/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH VOLUME BULAN INI	TARIF PER VOLUME BULAN INI (Rp)	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
I	Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN							
	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya						
	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin						
		JUMLAH I	0			0	0	0
II	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN							
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		1	0	13.216.014	1.559.460	14.775.474
		JUMLAH II	0			13.216.014	1.559.460	14.775.474
III	Pendapatan Jasa							
		JUMLAH III	0			0	0	0
IV	Pendapatan Keajaiban/Peradilan							
		JUMLAH IV	0			0	0	0
V	Pendapatan Denda I							
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah						
		JUMLAH V	0			0	0	0
VI	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu							
		JUMLAH VI	0			0	0	0
VII	Pendapatan Pelunasan Piutang							
		JUMLAH VII	0			0	0	0
VIII	Pendapatan dari Penutupan Rekening							
		JUMLAH VIII	0			0	0	0
IX	Pendapatan Lain-lain							
	123456789	coba						
		JUMLAH IX	0			0	0	0
X	Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang							
		JUMLAH X	0			0	0	0
XI	Pendapatan Jasa Lainnya							
		JUMLAH XI	0			0	0	0

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 005.05

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01

TAHUN : 2021
 BULAN : November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	VOLUME	TARIF (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH DISETOR (Rp)
I		Pendapatan dari Pemindah tangan BMN				
		JUMLAH I			0	0
II		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN				
		JUMLAH II			0	0
III		Pendapatan Jasa				
		JUMLAH III			0	0
IV		Pendapatan Kejaksaan/Peradilan				
	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan				
	425232	Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan HAK KEPANITERAAN LAINNYA	18	10.000	180.000	180.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	3	30.000	90.000	90.000
		- Pendaftaran Permohonan Banding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2	50.000	100.000	100.000
		- Pendaftaran Permohonan Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	1	50.000	50.000	50.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara HAK KEPANITERAAN LAINNYA	1	10.000	10.000	10.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan HAK KEPANITERAAN LAINNYA	21	10.000	210.000	210.000
		- Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2	10.000	20.000	20.000
		- Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	1	10.000	10.000	10.000
		- Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan HAK KEPANITERAAN LAINNYA	1.975	500	987.500	987.500
		- Redaksi Putusan/Penetapan HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	3	10.000	30.000	30.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	5	10.000	50.000	50.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	6	10.000	60.000	60.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	8	10.000	80.000	80.000
		- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	2	10.000	20.000	20.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	4	10.000	40.000	40.000
		- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	4	10.000	40.000	40.000
		- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	12	10.000	120.000	120.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	3	10.000	30.000	30.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	3	10.000	30.000	30.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/ Pemohon HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	1	10.000	10.000	10.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	5	10.000	50.000	50.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	5	10.000	50.000	50.000
		- Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tata Usaha Negara	1	10.000	10.000	10.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2	10.000	20.000	20.000

		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kasasi Perkara Tata Usaha Negara	2	10.000	20.000	20.000
		- Surat Penyerahan Memori Banding HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING -> PERADILAN TATA USAHA NEGARA	1	10.000	10.000	10.000
		JUMLAH IV			2.327.500	2.327.500
V		Pendapatan Denda I				
		JUMLAH V			0	0
VI		Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu				
		JUMLAH VI			0	0
VII		Pendapatan Pelunasan Piutang				
		JUMLAH VII			0	0
VIII		Pendapatan dari Penutupan Rekening				
		JUMLAH VIII			0	0
IX		Pendapatan Lain-lain				
		JUMLAH IX			0	0
X		Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang				
		JUMLAH X			0	0
XI		Pendapatan Jasa Lainnya				
		JUMLAH XI			0	0
XII		Pendapatan Bunga				
		JUMLAH XII			0	0
XIII		Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening				
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)				
		JUMLAH XIII			0	0
XIV		Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara				
		JUMLAH XIV			0	0
XV		Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I				
	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu				
		JUMLAH XV			0	0
XVI		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan				
		JUMLAH XVI			0	0
XVII		Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang				
		JUMLAH XVII			0	0
XVIII		Pendapatan Lain-lain II				
		JUMLAH XVIII			0	0
XIX		Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung RI - HAK UJI MATERIIL				
		JUMLAH XIX			0	0
		JUMLAH I s/d XVIII			2.327.500	2.327.500

Mengetahui
Sekretaris
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Fefi Yanti Thomas, SE
NIP. 197903102006042002

Jayapura, 30 November 2021
Bendahara Penerimaan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAYAPURA

CHRISTINA MEGAWATI YULIANA
ROHROHMANA, S.H.
NIP. 198508172019032006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PNB

FORM 01A

TAHUN : 2021
 BULAN : Januari - November
 NOMOR / TANGGAL DIPA : SP DIPA- 005.05.2.539139/2021 / 23-11-2020
 DEPARTEMEN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 PROPINSI / KABUPATEN : Prop. Irian Jaya / Kota Jayapura
 SATKER : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
 KPPN : JAYAPURA

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	TARGET	JUMLAH VOLUME BULAN INI	TARIF PER VOLUME BULAN INI (Rp)	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN BULAN INI (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
I	Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN	JUMLAH I	0				0	0
II	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	JUMLAH II	0				0	0
III	Pendapatan Jasa	JUMLAH III	0				0	0
IV	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan							
	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		0	18	10.000	1.150.000	180.000	1.330.000
	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		0	2067	10.000	12.365.000	1.907.500	14.272.500
	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		0	6	30.000	3.430.000	240.000	3.670.000
	425233 Pendapatan Ongkos Perkara		0			16.945.000	2.327.500	19.272.500
V	Pendapatan Denda i	JUMLAH IV	0					
VI	Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang Lalu	JUMLAH V	0			0	0	0
VII	Pendapatan Pelunasan Piutang	JUMLAH VI	0			0	0	0
VIII	Pendapatan dari Penutupan Rekening	JUMLAH VII	0			0	0	0
IX	Pendapatan Lain-lain	JUMLAH VIII	0			0	0	0
X	Pendapatan atas pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	JUMLAH IX	0			0	0	0
XI	Pendapatan Jasa Lainnya	JUMLAH X	0			0	0	0
XII	Pendapatan Bunga	JUMLAH XI	0			0	0	0

LAMPIRAN 5

LAPORAN PERKARA (LI- T1, LI – T2, LI- T3, LI- T4, LI- T5, LI – T6)



LAPORAN JENIS PERKARA
BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

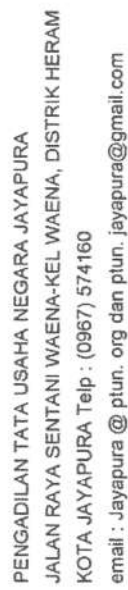
Formulir LI - T2

NO	JENIS PERKARA	PERKARA			PENGGUGAT		TERGUGAT		DISMISSAL	PERLAWANAN		PUTUSAN						SISA PERKARA BULAN INI	Permohonan						Terima Berkas			KET.
		MASUK	DICABUT	JUMLAH	PERORANGAN	BADAN HUKUM	PUSAT	DAERAH		DITOLAK	DIKABULKAN	GUGUR	DICABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIKABULKAN	JUMLAH		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A	GUGATAN																											
1	Perantahan	3	1	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	3	-	-		
2	Kepegawaian	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
3	Perijinan	4	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-		
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	2	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Kepala Desa dan Perangkat dosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Penggantian Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Merek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Lain - Lain	3	1	-	4	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		13	2	-	15	9	2	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	1	2	-	-	4	-	-		

Jayapura, 30 November 2021

Mengetahui :
Plh KETUA,
YUSUF KLEIMEN, SH
NIP. 196605121992031002

PANITERA,
SUYADL SH
NIP. 197205151994031002



Formulir LI - T3

[illegible]

PIR-KETUA



YUSUF KLEMEN, SH

NIP. 196605121992031002



Jayapura, 30 November 2021

dPANITERA,
 SUYADI, SH
 NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
JALAN RAYA SENTANI WAENA-KEL WAENA, DISTRIK HERAM
KOTA JAYAPURA Telp : (0967) 574160
email : jayapura @ ptun. org dan ptun. jayapura@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
BULAN NOVEMBER 2021

Formulir LJ - T4

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL	NAMA PENERIMA JASA	NAMA ORGANISASI PEMBERI JASA	KEDUDUKAN PEMOHON BANTUAN	JENIS JASA BANTUAN	KETERANGAN
1	-	08-011-2021	Yustinus Kakum	ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAPUA JUSTICE & PEACE YULIYANTO,SH.,MH. 0811488998, Jl. Jeruk Nipis Depan RS-POLRI Bhayangkara, Jayapura-Papua	Pemohon	Konsultasi Hukum terkait Uang pembelian belum dibayarkan dan SK pemberhentian belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Asmat	
2	-	15-011-2022	Maikel Kuram		Pemohon	Konsultasi Hukum Mengenai cara mengurus dokumen untuk membuat suatu badan Hukum Yayasan	
3	-	15-011-2022	Bunga Lestari		Pemohon	Konsultasi Hukum terkait masalah tanah dokumen jual beli tanah dan pelepasan adatnya sudah ada beberapa orang datang mempermasalahkan tanah tersebut dengan alas namakan pemilik hak Ulayat	

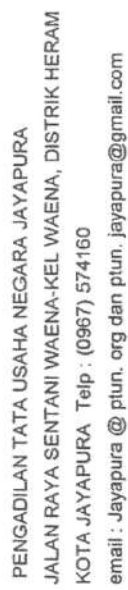


Mengetahui :
Plh KETUA,

YUSUF KLEMEN, SH
NIP. 196605121992031002

Jayapura, 30 November 2021
PANITERA,

SUYADI, SH
NIP. 197205151994031002



Formulir L1-T5

[illegible]

PIH K E T U A,



4 PANITERA,

SUYADI, SH

NIP. 197205151994031002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Jln. RAYA SENTANI - WAENA - JAYAPURA 99358
KOTA JAYAPURA Telp : (0967) 574160
email : Jayapura @ ptun. org dan ptun. jayapura@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN PERKARA
(PENGADILAN TINGKAT PERTAMA)
BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

Biaya Perkara/Panjar Biaya Perkara

Form :LI-T6

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	45,130,600	-	-	45,130,600
2	Penerimaan	-	13,312,500	-	13,312,500
3	Alat Tulis Kantor	-	-	800,000	800,000
4	Biaya Panggilan	-	-	621,000	621,000
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	1,327,000	1,327,000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	4,920,000	4,920,000
7	Biaya Pemberkasan Dan Pengiriman Berkas	-	-	1,226,000	1,226,000
7	Biaya Pengiriman Perkara	-	-	1,663,000	1,663,000
8	Materai	-	-	30,000	30,000
9	PNBP:	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	240,000	240,000
	b. Redaksi	-	-	30,000	30,000
	c. Pengembalian Sisa Panjar	-	-	158,000	158,000
	d. PNBP Lain-lain	-	-	849,500	849,500
	Jumlah	45,130,600	13,312,500	11,864,500	46,578,600

Biaya Proses/ATK/Pemberkasan

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	11,543,000	-	-	11,543,000
2	Penerimaan	-	800,000	-	800,000
3	Pengeluaran (untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu)	-	-	-	-
	Jumlah	11,543,000	800,000	-	12,343,000

Biaya Eksekusi

No.	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6(3+4-5)
1	Saldo Awal	1,420,000	-	-	1,500,000
2	Penerimaan	-	-	-	-
3	Materai	-	-	-	-
4	Biaya Surat Panggilan	-	-	-	-
5	Biaya Surat Pemberitahuan	-	-	-	-
5	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-	-
6	Surat Pemberitahuan Kepada Presiden/DPR	-	-	-	-
7	Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	1,420,000	-	-	1,420,000

Jayapura, 30 November 2021

MENGETAHUI :
Pih KETUA,

YUSUF KLEMEN, SH
NIP. 196605121992031002

PANITERA,

SHYADI, SH
NIP. 197205151994031002